

Judul : Produksi Baja Ilegal - 40 Pabrik China Kudu Disanksi Tegas
Tanggal : Minggu, 05 Mei 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Produksi Baja Ilegal 40 Pabrik China Kudu Disanksi Tegas

ANGGOTA Komisi VII DPR Mulyanto mendesak Pemerintah segera mencabut izin usaha 40 perusahaan asal China yang terbukti memproduksi baja ilegal. Kegiatan tersebut sudah sangat merugikan negara.

"Tentu ini harus ditindak sebagai upaya menegakkan aturan hukum. Mengingat, beredar nya, baja ilegal itu sangat berbahaya bagi keamanan konsumen dan juga bisa merugikan perusahaan baja lain yang mematuhi peraturan perundang-undangan," kata Mulyanto, Sabtu (4/5/2024).

Dia mengungkapkan, setidaknya terdapat 40 perusahaan asal China yang memproduksi baja ilegal atau baja yang tidak memenuhi standar nasional Indonesia. Baja-baja ini diproduksi menggunakan metoda induksi yang tidak diizinkan di China maupun di Indonesia. Tentunya, proses produksi baja ilegal ini akan berbahaya bagi kelestarian lingkungan dan keamanan konsumen.

Untuk itu, dia meminta Pemerintah tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan hukum terhadap perusahaan-perusahaan asing yang memproduksi baja ilegal ini. Tindakan hukum ini untuk memastikan bahwa Pemerintah tidak main-main terhadap perusahaan baik asing maupun domestik yang bertindak curang.

"Kita memang membutuhkan investasi dari luar, namun investasi yang berkualitas, sehingga mampu menggerakkan ekonomi nasional. Bukan malah menimbulkan komplikasi bagi ekonomi domestik," tegasnya.

Politisi Fraksi PKS ini pun berpesan agar semua kementerian/lembaga terkait, harus segera melakukan koordinasi dan mengambil keputusan tegas, yaitu mencabut izin operasional perusahaan yang memproduksi baja ilegal ini. Bahkan bila perlu, ditelusuri pihak-pihak mana saja yang menjadi beking dari kegiatan praktik ilegal ini.

"Karena bukan tidak mungkin ada prosedur lain yang dilanggar oleh perusahaan-perusahaan itu sehingga berani memproduksi baja yang tidak sesuai standar Indonesia," katanya.

Mulyanto mengingatkan, tidak boleh hanya demi kepentingan menggenjot investasi asing, Pemerintah malah terkesan permisif. Membolehkan apa pun yang diminta investor, asal berkenan mendirikan

usaha di Indonesia.

Menurutnya, tindakan permisif atau memberi ke-longgaran dengan memenuhi kepentingan investor walau melabrak aturan, tentu sangat membahayakan negara.

"Secara tidak langsung Pemerintah seperti mengga-dai kedaulatan negara kepada perusahaan-perusahaan asing. Padahal ujung-ujungnya sangat merugikan masyarakat dan negara," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan ada 40 perusahaan yang dituduh memproduksi baja tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Zulhas menyebut dari 40 perusahaan tersebut, baru tiga yang dilakukan penindakan.

"Pabriknya ada 40 bukan satu pabrik, yang pernah saya segel tiga baru, dari 40. Seperti ini (pabriknya) tetapi beda-beda (perusahaan)," kata Mendag di PT Hwa Hok Steel, Kawasan Industri Modern Cikande, Barengkok Serang, Banten, Jumat (26/4/2024).

PT Hwa Hok Steel (HHS) merupakan perusahaan asal China yang membuka pabrik di Indonesia untuk memproduksi baja. Namun sayangnya produksi baja yang dilakukan banyak tidak sesuai SNI.

"Jadi kalau mau melanjutkan sampai 40 kita tertibkan kalau tidak memenuhi aturan, sebulan satu kali (ditindak), dua tahun bisa kelar," jelasnya. Adapun ke-40 perusahaan tersebut, lanjut Zulhas, diduga merupakan pindahan dari China. Dari negara asalnya sudah tidak boleh beroperasi.

"Nah disinyalir pabrik seperti ini ada 40 yang dulu di China sudah nggak boleh pabrik seperti ini, pindah ke-mari. (Karena) Kita butuh tenaga kerja, ya sudahlah kasih masuk. Tapi sekali lagi, ada oknum industri seperti ini, kita akan lihat melanggar SNI, itu berbahaya, sangat merugikan konsumen," terangnya.

Zulhas dalam kunjungan tersebut, langsung melakukan pengamanan terhadap pabrik PT Hwa Hok Steel (HHS) yang memproduksi Baja Tulangan Beton (BTB). Ditemukan 3,6 juta batang atau 27.078 ton baja yang diproduksinya tidak sesuai SNI.

Dia menyebut, nilai baja tidak sesuai standar itu mencapai Rp 257 miliar lebih. Kemudian kemudian memutuskan 3,6 juta batang baja tersebut untuk dimusnahkan. ■ KAL



Speaker Quote

"Kita memang membutuhkan investasi dari luar, namun investasi yang berkualitas, sehingga mampu menggerakkan ekonomi nasional. Bukan malah menimbulkan komplikasi bagi ekonomi domestik."

■ Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto